

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safri Nugraha. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukandarrumidi. 2018. *Bahan-bahan Galian Industri*. Yogyakarta: UGM Press.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

C. Jurnal

Robi Surya Rusmana, dkk. 2017. *Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan
Pengawasannya Rakyat di Kawasan Pesisir Barat*. Bandar Lampung:
Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Website

[Http://news.klikpositif.com/baca/20594/ini-lokasi-tambang-ilegal-yang-terdeksi-di-sumbar](http://news.klikpositif.com/baca/20594/ini-lokasi-tambang-ilegal-yang-terdeksi-di-sumbar) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 19.15 WIB).

[Http://tvrisumbar.co.id/berita/detil281/tim-gabungan-razia-galian-c,-3-mesin-pengeruk-diamankan.html](http://tvrisumbar.co.id/berita/detil281/tim-gabungan-razia-galian-c,-3-mesin-pengeruk-diamankan.html) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.05 WIB)

[Http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/57215/tiga-mesin-sedot-diamankan-sk4.html](http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/57215/tiga-mesin-sedot-diamankan-sk4.html) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.15 WIB)

[Http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/65262/aktivitas-galian-c-di-sungai-naras-kembali-marak.html](http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/65262/aktivitas-galian-c-di-sungai-naras-kembali-marak.html) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.15 WIB)

